

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA DAN KENDALA YANG DIHADAPI SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN WARGA NEGARA MUDA YANG BAIK DAN CERDAS

Suroto

Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Alamat e-mail: suroto_unlam@yahoo.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperoleh perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan mempunyai makna 1. Dalam merumuskan pendidikan harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila 2. Sistem pendidikan nasional haruslah berlandaskan Pancasila 3. Hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila.

Pengantar

Pendidikan merupakan suatu sistem yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh sistem-sistem kehidupan lain yang terjadi di luar sistem pendidikan. Dalam kerangka keterkaitan antara sistem pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan di luar sistem tersebut terdapat beberapa faktor di luar sistem pendidikan yang perlu memperoleh perhatian serius agar tampak adanya keterkaitan fungsionalnya masing-masing. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor kependudukan, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial-budaya, hubungan internasional dan sebagainya. Pendidikan memiliki fungsi yang hakiki dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai aktor-aktor dalam pembangunan maupun untuk menjalankan fungsi dari berbagai bidang kehidupan yang bersangkutan. Berkaitan dengan

fungsi tersebut berjalannya sistem pendidikan tidak boleh lepas dari perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tidak semata-mata datang dari sistem pendidikan secara internal, bahkan yang lebih banyak adalah tantangan eksternal atau tantangan yang berasal dari luar sistem pendidikan itu sendiri. Tantangan eksternal dari sistem pendidikan seharusnya merupakan sumber aspirasi yang paling utama dalam melakukan perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan secara internal. Dengan demikian pendidikan tidak akan terus mendapat tuduhan membangun pulau sendiri (building its own island) seperti halnya kritik-kritik yang selalu terlontar dari berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap sistem pendidikan nasional.

Tantangan masa depan bagi sistem pendidikan di Indonesia tidaklah semata-mata menyangkut bagaimana meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal (internal efficiency), tetapi bahkan yang lebih penting adalah menyangkut bagaimanakah meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan bidang-bidang kehidupan lain (external efficiency). Pembangunan sistem pendidikan tidak seharusnya hanya ditujukan pada pengembangan pendidikan sebagai sistem tersendiri, tetapi juga pengembangan sistem pendidikan sebagai salah satu sistem atau bagian yang integral dari sistem lain yang lebih luas. Dengan demikian pembangunan sistem pendidikan harus mampu memberikan arti fungsional bagi pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan nasional berdasarkan filsafat Pancasila, paradigma pendidikan dan pemberdayaan manusia seutuhnya, paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif, dan Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan

Pendidikan Nasional Berdasarkan Filsafat Pancasila

Secara mendasar landasan filsafat Pancasila menyiratkan bahwa sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin pembangunan kehidupan yang berharkat dan bermartabat, sebagai makhluk yang mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun negara.

Bagi bangsa Indonesia, pandangan hidupnya adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan mempunyai makna:

1. Dalam merumuskan pendidikan harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila.
2. Sistem pendidikan nasional haruslah berlandaskan Pancasila.
3. Hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan, sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila.

Penyebab Kelemahan Pembangunan Pendidikan di Indonesia

1. Efektifitas Pendidikan Di Indonesia

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut, yang terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat oleh

masyarakat. Anggapan seperti itu jugalah yang menyebabkan efektifitas pengajaran di

secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil

Indonesia sangat rendah. Setiap orang mempunyai kelebihan dibidangnya masing-masing dan diharapkan dapat mengambil pendidikan sesuai bakat dan minatnya bukan hanya untuk dianggap hebat oleh orang lain.

2. Efisiensi Pengajaran di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih 'murah'. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahal biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik.

Selain masalah mahal biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah waktu pengajaran. Sesuai dengan keadaan lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarannya perhari dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat, bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan

mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

3. Standardisasi Pendidikan di Indonesia

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Seperti yang kita lihat sekarang ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan formal maupun informal terlihat hanya kerangka terhadap standar dan kompetensi. Kualitas pendidikan diukur oleh standar dan kompetensi di dalam berbagai versi, demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standardisasi dan kompetensi tersebut seperti Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

4. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

5. Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik

sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah jugadipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

6. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.

7. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

8. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan

menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan

pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

9. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan

Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja inidisebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yangdibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

10. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

11. Solusi dari Permasalahan-permasalahan Pendidikan di Indonesia

Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan yaitu: Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (mazhab neoliberalisme), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawabnegara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan.

Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

pendekatan lain, yaitu dengan menggunakan pendekatan professional.

Tantangan Pendidikan di Masa Depan

Beberapa persoalan yang harus diperhatikan pada masa mendatang berkaitan dengan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan mutu pendidikan yang terjadi karena sumber-sumber pendidikan kita tidak merata, kekuatan sumber daya manusia (tenaga kependidikan) yang bervariasi, sistem

pendidikan yang terlalu (regulated) serta pelaksanaan pendidikan yang ditandaidengan rentang kontrol dan kendali yang terlalu jauh. Ketidakmerataan ini bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh kerumitan wilayah dan keanekaragaman masyarakat.

2. Pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional yang masih diatur terlalu ketat oleh pemerintah (kurikulum buku pelajaran, seragam sekolah, standarisasi alat praktik, pendidikan guru dan sebagainya). Pengetatan ini menimbulkan program pendidikan yang konservatif, tidak sejalan dengan kebutuhan profesi dan keahlian yang terus berkembang secara progresif.
3. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya besar yang menitikberatkan pada dimensi teknis pendidikan (menatar guru, memperbaiki kurikulum, membuat buku paket dan sebagainya) yang telah dilakukan sejak paling tidak sejak 40 tahun yang lalu belum memperlihatkan hasil yang optimal. Masalah mutu pendidikan masih mirip dengan masalah yang 40 tahun lalu dihadapi. Mungkin kita percaya upaya tersebut dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Munib, Ahmad, 2009. Pengantar Ilmu Pendidikan. (On-line). Tersedia di: http://moshimoshi.netne.net/materi/ilmupendidikan/bab_3.htm. Diakses tanggal 20 Nopember 2011.
- Suryadi, Ace dan Budimansyah, Dasim, 2009. Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Widya Aksara Press.
- Suryadi, Ace, 2009. Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Bandung: Widya Aksara Press.
- Latif, Yudi, 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Dasim, Budimansyah, 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Sagala, Syaiful dan Gultom Syawal, 2011. Praktik Etika Pendidikan di Seluruh Wilayah NKRI: Langkah Utama Membasmi Sifat Korup dan Keterpurukan Bangsa Indonesia, Membangun Karakter Jujur, Disiplin dan Tanggung Jawab Generasi Muda. Bandung: Alfabeta.